

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. R., & Vizandra, E. P. (2025). Optimalisasi Penggunaan E-Faktur Pajak pada Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 132-138.
- Al Maliki, M. A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132-5140.
- Ardiansah, Y. M., & Sucahyati, D. (2026). PROSEDUR PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KELUARAN MELALUI CORETAX PADA PT X. *Jurnal Pabean*, 8(1), 32-38.
- Associe. (2026). *Perbedaan Coretax Form dengan e-Form DJP*. Associe. Diakses pada 10 April 2026, dari <https://associe.co.id/tax-and-accounting/perbedaan-coretax-form-dengan-eform-djp/>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029-1040.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat*. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada 3 Mei 2026, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax DJP*. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada 10 April 2026, dari <https://pajak.go.id/coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Evolusi e-Faktur*. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada 10 April 2026, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/evolusi-e-faktur>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. JDIH Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak dan Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak serta Penerapan PMK 131 Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). *Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13 (03).
- Mauludi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis penerapan sistem e-faktur dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN klien pada KJA Ari Prawesthi. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(2), 226-235.
- MUC Consulting. (2025). *Berlaku untuk Seluruh PKP, DJP Aktifkan Kembali Aplikasi e-Faktur*. MUC Consulting. Diakses pada 10 April 2026, dari <https://muc.co.id/id/article/berlaku-untuk-seluruh-pkp-djp-aktifkan-kembali-aplikasi-e-faktur>
- Nugraheni, B. A. (2025). *Coretax DJP: Ketika Faktur Pajak Diterima Seketika*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Ortax. (2025). *Buat Faktur Pajak di e-Faktur Desktop, Coretax Otomatis Sesuaikan NSFP*. Ortax. Diakses pada 10 April 2026, dari <https://ortax.org/buat-faktur-pajak-di-e-faktur-desktop-coretax-otomatis-sesuaikan-nsfp>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 74.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. UU HPP resmi tercatat sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer: Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35-67.
- Wulandari, H., & Raharjo, Y. (2026). Analisis Efektivitas Web Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai Solusi Pembuatan Faktur Pajak Keluaran di PT Petrokimia Gresik. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 9(1), 149-161.